

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

PROGRAM : Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
Program : Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Tujuan : - Terselenggaranya Musrenbang RKPD	1. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang perencanaan partisipatif, bottom-up, top-down, teknokratik, politik 2. Musrenbang salah satu instrument untuk menjawab pendekatan bottom up 3. RKPD 2026 porsi terkait dengan isu gender masih minim di Bab II, Bab III, Bab IV dan bab V 4. Jumlah penduduk Dharmasraya	Akses: - Orang yang menghadiri sudah ditentukan (undangan menghadiri untuk orang tertentu/ tidak menjangkau semua komponen) Partisipasi: (dalam menyampaikan aspirasi) - Keterlibatan mayoritas laki-laki pada musrenbang Musrenbang RKPD Kabupaten - Partisipasi perempuan lebih sedikit dibanding peserta laki-laki, dan kualitas perwakilan perempuan relatif	- ASN yang berperan sebagai Fasilitator dan narasumber tidak memahami konsep responsif Gender - Kesenjangan Gender dimana laki-laki lebih banyak menduduki jabatan penting daripada perempuan - Petunjuk Musrenbang belum Responsif Gender	- Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konsep Gender yang menganggap gender sebagai mendahulukan perempuan - Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konsep gender - Budaya Patriarki yang mengutamakan Pria sebagai pemimpin dalam hal kepala keluarga, tokoh masyarakat, ketua kelompok, dll - Terbatasnya akses dan partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan, dimana perempuan dianggap lebih mendahulukan perasaan dibanding fakta	Terakomodir nya usulan masyarakat berbasis gender dalam dokumen perencanaan	- Sosialisasi dan undangan secara adil dan merata - partisipasi kelompok perempuan yang mewakili gender minimal 30% - Sosialisasi tentang yang akan dibahas dalam perencanaan pembangunan guna meningkatkan kualitas peserta musrenbang (khususnya) perempuan - Juknis yang responsif	- Pelaksanaan musrenbang RKPD Tahun 2026 jumlah peserta laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan (70,95%) atau 29,04%	Input : Dana untuk pelaksanaan kegiatan musrenbang Tahun 2027 sebesar Rp.49.899.000,- Output: Jumlah berita acara musrenbang Outcomes : Terakomodirnya perencanaan pembangunan yang responsif gender

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
	secara keseluruhan pada tahun 2025 sebanyak 248.110 dimana jumlah penduduk laki-laki : 125.580 dan perempuan : 122.520 5. Jumlah peserta musrenbang RKPD Tahun 2026 dari 303 Orang, laki-laki 215 orang atau 70,95% perempuan 88 orang atau 29,04 % 6. Usulan masyarakat lebih banyak pada bidang fisik dan prasarana minim usulan yang menjadi	pasif dibandingkan peserta laki-laki sehingga tidak bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan - Utusan Perwakilan dari kecamatan pada kegiatan musrenbang didominasi laki-laki dibanding perempuan, karena terkait petugas/pejabat wewenang nagari didominasi kaum laki-laki Control: - Kemampuan masyarakat menentukan usulannya tergantung pada prioritas, keselarasan pembangunan daerah, provinsi				gender dalam proses musrenbang (advokasi, sosialisasi Pengarusutamaan gender)		

GENDER BUDGET STATEMENT

SKPD : BAPPERIDA KAB. DHARMASRAYA

TAHUN ANGGARAN : 2027

Program	Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Kode Program	5.01.02
Kegiatan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Hasil/ Output	Dokumen perencanaan (RKPD) yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas
Analisa Situasi	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) - Permendagri 86 Tahun 2017 tentang perencanaan partisipatif, bottom-up, top-down, teknokratik, politik - Musrenbang salah satu instrument untuk menjawab pendekatan bottom up - RKPD kab. Dharmasraya Tahun 2026 porsi terkait dengan isu gender masih minim di Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V - Jumlah peserta musrenbang dari 303 Orang, laki-laki 215 orang atau 70,95% perempuan 88 orang atau 29,04 % - Usulan masyarakat lebih banyak pada bidang fisik dan prasarana - Minim usulan yang menjadi kebutuhan mayoritas perempuan 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Akses: : - Orang yang menghadiri sudah ditentukan (undangan tidak menjangkau semua komponen) Partisipasi: - Keterlibatan mayoritas laki-laki pada musrenbang Musrenbang RKPD Kabupaten - Partisipasi perempuan lebih sedikit dibanding peserta laki-laki, dan kualitas perwakilan perempuan relatif pasif dibandingkan peserta laki-laki sehingga tidak bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan - Utusan Perwakilan dari kecamatan pada kegiatan musrenbang didominasi laki-laki dibanding perempuan, karena terkait petugas/pejabat wewenang nagari didominasi kaum laki-laki Control: - Kemampuan masyarakat menentukan usulannya tergantung pada prioritas, keselarasan pembangunan daerah, provinsi Manfaat : - Porsi pengelolaan anggaran lebih banyak ditentukan oleh pendekatan topdown dan politik b. Penyebab Internal - ASN yang berperan sebagai fasilitator dan narasumber tidak memahami konsep responsif gender - Kesenjangan Gender dimana laki-laki lebih banyak menduduki jabatan penting daripada perempuan - Petunjuk Musrenbang belum Responsif Gender

	c. Penyebab Eksternal - Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konsep Gender yang menganggap gender sebagai mendahulukan perempuan - Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konsep gender - Budaya Patriaki yang mengutamakan Pria sebagai pemimpin dalam hal kepala keluarga, tokoh masyarakat, ketua kelompok, dan lain-lain - Terbatasnya akses dan partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan, dimana perempuan dianggap lebih mendahulukan perasaan dibanding fakta	
Rencana Aksi	Komponen/ Aktifitas 1	Sosialisasi tentang yang akan dibahas dalam perencanaan pembangunan
		Tujuan Meningkatkan kualitas peserta musrenbang (khususnya) perempuan
		Alokasi Anggaran Rp. 49. 889.000,-
	Komponen/ Aktifitas 2	Juknis yang responsif gender dalam proses musrenbang
		Tujuan Fasilitasi gender dalam musrenbang
		Alokasi Anggaran Rp. 49. 889.000,-
	Total Anggaran	Rp. 49. 889.000,-
Capaian Program	Output : RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2027 yang responsif Gender	
	Outcome : Terakomodirnya usulan masyarakat berbasis gender dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	

Pulau Punjung, 23 Juni 2027

**KEPALA BAPPERIDA,
KABUPATEN DHARMASRAYA**



FRINALDI ST., M.Sc
NIP. 19751205 200501 1 004

Tim Verifikasi

INSPEKTUR RAHMADANI, S.H., M.H NIP. 19760830 20012 1 00 1	KEPALA BKE MARTEN YUNUS, S.H. NIP. 19740821 200212 1 001	KEPALA BAPPERIDA FRINALDI ST., M.Sc NIP. 19751205 200501 1 004	KEPALA DINSOSP3APKB MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018
---	--	--	--

KAK/ TOR

Program		Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sasaran Program		Optimalisasi keterlibatan stakeholder dalam RKPD
Kegiatan		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub Kegiatan		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
	Gambaran Umum	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional
	Indikator Kinerja	Terlaksananya Musrenbang RKPD Kab. Dharmasraya
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Terakomodirnya hasil musrenbang dalam RKPD
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Mengundang utusan nagari, utusan kecamatan, stakeholker terkait untuk merumuskan usulan prioritas dalam musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten, murenbang provinsi dan musrenbang nasional dalam waktu yang telah ditentukan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Penanggung Jawab : Kepala BAPPERIDA
Jadwal		Bulan Januari-Mei 2027
Biaya		Rp. 49.889.000,-

Pulau Punjung, 23 Juni 2026

**KEPALA BAPPERIDA,
KABUPATEN DHARMASRAYA**

FRINALDI ST., M.Sc
NIP. 19751205 200501 1 004

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

PROGRAM : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 yang mengamalkan setiap pemerintah daerah membentuk PUG yang salah satu tugasnya Menyusun perencanaan dan anggaran yang responsif gender - Pelaksanaan PPRG Kab. Dharmasraya belum maksimal baru sekedar memenuhi administrasi (pokja PUG/focal point baru sebatas SK tapi belum berperan)	Akses : Terbatasnya informasi terkait PUG dan PPRG Partisipasi : Komitmen kepala OPD masih kurang dengan minimnya kehadiran pada pelaksanaan sosialisasi atau menindaklanjuti penyusunan GAB dan GBS Kontrol :-	- Belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas	PUG dianggap tidak menarik dan dianggap hanya mengurus problema perempuan	Terwujudnya Perencanaan yang Responsif Gender	1. Penelaahan GAB dan GBS 2. Pemanfaatan dan evaluasi pelaksanaan PUG	Semua OPD sudah membuat GAB dan GBS (37 OPD)	Input : Rp. 15.736.000,- Output : Perencanaan yang Responsif Gender Out Come : Terwujudnya pengarusutamaan gender di Kab. Dharmasraya

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Tujuan : Terwujudnya Perencanaan yang Responsif Gender	- Belum semua OPD menindaklanjuti Kebijakan agar mencantumkan dasar hukum, data terpilih dan isu gender didalam Renstra, Renja OPD							
Sasaran : Perencanaan (OPD)								

Pulau Punjung, 23 Juni 2026

KEPALA BAPERIDA,
KABUPATEN DHARMASRAYA

FRINALDI ST., M.Sc
NIP. 19751205 200501 1 004

Tim Verifikasi

INSPEKTUR RAHMADANI, SH., M.H NIP. 19760830 20012 1 00 1	KEPALA BAPERIDA MARTEN GUNUS, S. ST, MT, Eng NIP. 19740821 20061 1 001	KEPALA BAPERIDA FRINALDI ST., M.Sc NIP. 19751205 200501 1 004	KEPALA DINSOSP3APKB MARTIN EFENDI, S. HUT, M. M NIP. 19790905 200801 1 018
--	--	---	--

GENDER BUDGET STATEMENT

SKPD : BAPPERIDA DHARMASRAYA

TAHUN ANGGARAN : 2027

Program	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
Kode Program	5.01.03		
Kegiatan	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
Hasil/ Output	Perencanaan Responsif Gender		
Analisa Situasi	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) - Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 yang mengamanatkan setiap pemerintah daerah membentuk PUG yang salah satu tugasnya Menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender - Pelaksanaan PPRG Kab. Dharmasraya belum maksimal baru sekedar memenuhi administrasi (pokja PUG/focal point baru sebatas SK tapi belum berperan - PUG masih dianggap tugas tambahan - Focal Point dimasing-masing OPD belum berjalan optimal (pelengkap administrasi) dimana rata-rata focal point belum mempromosikan PUG dimasing-masing OPD dan PUG belum dianggap kebutuhan - Belum semua OPD menindaklanjuti kebijakan agar mencantumkan dasar hukum, data terpilah dan isu gender didalam Renstra, Renja OPD 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Akses : - Terbatasnya informasi terkait PUG dan PPRG Partisipasi : - Komitmen kepala OPD masih kurang dengan minimnya kehadiran pada pelaksanaan sosialisasi atau menindaklanjuti penyusunan GAB dan GBS Kontrol : - Manfaat : - Masih dianggap sebagai tambahan - Manfaat penerapan GAB dan GBS tidak langsung terasa - Tidak ada punishment dan reward b. Penyebab Internal - Komitmen kepala OPD masih kurang dengan minimnya kehadiran pada pelaksanaan sosialisasi atau menindaklanjuti penyusunan GAB dan GBS - Belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas c. Penyebab Eksternal - PUG dianggap tidak menarik dan dianggap hanya mengurus problema perempuan		
Rencana Aksi	Komponen/ Aktifitas 1	Penyusunan surat edaran pelaksanaan PUG pada masing-masing OPD	
		Tujuan	Terwujudnya pengarusutamaan gender diKab. Dharmasraya
		Alokasi Anggaran	Rp. 15.736.000,-
	Komponen/ Aktifitas 2	Penelaahan GAB dan GBS	
		Tujuan	Terwujudnya pengarusutamaan gender sesuai perencanaan di Kab. Dharmasraya
		Alokasi Anggaran	Rp. 15.736.000,-

	Komponen/ Aktifitas 3	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG	
		Tujuan	Terwujudnya pengarusutamaan gender sesuai perencanaan di Kab. Dharmasraya
		Alokasi Anggaran	Rp. 15.736.000,-
	Total Anggaran	Rp. 15.736.000,-	
Capaian Program		Out put : Perencanaan yang responsive Gender Out come : Terwujudnya pengarusutamaan gender di Kab. Dharmasraya	

Pulau Punjung, 23 Juni 2026

**KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN DHARMASRAYA**



FRINALDI ST., M.Sc
NIP. 19751205 200501 1 004

Tim Verifikasi

INSPEKTUR RAHMADANI, S.H., M.H NIP. 19760830 20012 1 00 1	KEPALA BPPD MARTEN YUNUS, S.Kom. M. Eng NIP. 19740821 2001212 1 001	KEPALA BAPPERIDA FRINALDI ST., M.Sc NIP. 19751205 200501 1 004	KEPALA DINSOSP3APPKB MARTIN EFENDI, S. HUT. M. M NIP. 19790905 200801 1 018
---	---	--	---

KAK/ TOR

Program		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Sasaran Program		Koordinasi Perencanaan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Kegiatan		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Latar Belakang	Dasar Hukum	Pemendagri Nomor 67 Tahun 2011 yang mengamanatkan setiap pemerintah daerah membentuk PUG yang salah satu tugasnya Menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
	Gambaran Umum	- Terbatasnya informasi terkait PUG dan PPRG - Komitmen kepala OPD masih kurang dengan minimnya kehadiran pada pelaksanaan sosialisasi atau tindaklanjuti penyusunan GAB dan GBS - PUG Masih dianggap sebagai tambahan - Manfaat penerapan GAB dan GBS tidak langsung terasa
Kegiatan	Uraian Kegiatan	- Rapat koordinasi dengan SKPD - Monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD)
	Indikator Kinerja	- Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup bidang pembangunan manusia - Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup lingkup bidang pembangunan manusia - Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup bidang pemerintahan
	Batasan Kegiatan	Januari s/d Desember 2027
Maksud dan Tujuan		Terwujudnya Perencanaan yang Responsif Gender
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Rapat Koordinasi dengan SKPD Pengampu Gender
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		BAPPERIDA Kab. Dharmasraya, BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Keluarga Bencana
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		1. Kuasa Pengguna anggaran 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Jadwal		Januari s/d Desember 2027
Biaya		Rp. 15.736.000,-

Pulau Punjung, 23 Juni 2026

**KEPALA BAPPERIDA,
KABUPATEN DHARMASRAYA**

FRINALDI ST, M.Sc
NIP. 19751205 200501 1 004